



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31036207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Jakarta, 11 Desember 2024

Nomor : B-24789.A/Dt.9.1/ME.01.01/12/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Verifikasi Masa Pelaporan Triwulan IV TA 2024
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Yth.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pelaporan tepat waktu melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006 pada Triwulan III yang lalu. Bersama ini, kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan IV TA 2024 melalui Aplikasi e-Monev:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan IV TA 2024 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>) untuk melaporkan realisasi **Komponen, Rincian Output, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**.
2. Selanjutnya, setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Batas akhir masa verifikasi pada Triwulan IV TA 2024 adalah **12 Februari 2025 Pukul 23.59 WIB**
3. Dimohon agar dapat **meneruskan** surat pengingat verifikasi masa pelaporan triwulan IV TA 2024 kepada seluruh satuan kerja pelaksana dalam lingkup masing-masing unit kerja kementerian/lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan**

JL. HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNGINGAN, JAKARTA SELATAN

Telp/fax: 021-50927412

e-mail: laporan.pp39@bappenas.go.id

Plt. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Tembusan:
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



Lampiran

Nomor : B-24789.A /Dt.9.1/ME.01.01/12/2024

Tanggal : 11 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
25. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Badan Intelijen Negara;
35. Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Dewan Ketahanan Nasional;
37. Badan Pusat Statistik;
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
40. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
43. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Badan Narkotika Nasional;
47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
51. Komisi Pemilihan Umum;
52. Mahkamah Konstitusi;
53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

54. Badan Informasi Geospasial;
55. Badan Standarisasi Nasional;
56. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
57. Lembaga Administrasi Negara;
58. Arsip Nasional;
59. Badan Kepegawaian Negara;
60. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
61. Kementerian Perdagangan;
62. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
63. Komisi Pemberantasan Korupsi;
64. Dewan Perwakilan Daerah;
65. Komisi Yudisial;
66. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
67. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
68. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
69. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
70. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
71. Ombudsman Republik Indonesia;
72. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
75. Sekretariat Kabinet;
76. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
77. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
78. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
79. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
80. Badan Keamanan Laut;
81. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
82. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
83. Badan Pangan Nasional;
84. Otorita Ibu Kota Nusantara;
85. Badan Karantina Indonesia.